

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka

1. Konsep Pendidikan Kewarganegaraan

a. Pengertian

Secara ontologi, Pendidikan Kewarganegaraan berkembang dari konsep “*civics*”. Secara harfiah, *civics* berasal dari bahasa Latin “*civicus*” yang artinya warga negara. Secara akademis *civics* sebagai embrio dari “*civic education*”, kemudian di Indonesia menjadi ‘Pendidikan Kewarganegaraan’ (PKn). Dari sudut pandang epistemologis, pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dikembangkan dari salah satu tradisi *social studies*, yakni “*social studies taught as citizenship transmission, social studies taught as social science, and social studies taught as reflective inquiry*”. Tradisi “*Social Studies Taught as Citizenship Transmission*” merujuk pada suatu modus pembelajaran sosial yang bertujuan untuk mengembangkan warganegara yang baik, yang ditandai oleh “*....conforms to certain accepted partices, hold particular beliefs, is loyal to certain values, participates in certain activities, and conforms to norms which area often local in character*”. Oleh karena itu tujuan dari tradisi ini adalah mengembangkan “*a reasoned patriotism; a basic understanding and appreciation of (American) values, institution, and practices; personal identity and integrity and responsible citizenship; understanding and appreciation of the (American heritage; active democratic participation; an awareness of social problems, and desirable) ideals, attitudes, and behavioral skills*” (Barr dkk, 1978: 47).

Dalam kajian lain, tradisi seperti tersebut di atas bertujuan untuk mengembangkan warganegara yang baik sesuai dengan nilai dan norma yang telah diterima secara baku dalam suatu negara. Dari tradisi ini berkembang menjadi “*body of knowledge*” yang dikenal dan memiliki paradigma sistemik yang di dalamnya terdapat tiga domain “*citizenship education*”, yakni domain akademis, domain kurikuler, dan domain sosial kultural (Winataputra, 2001). Ketiga domain tersebut saling terkait secara struktural dan fungsional yang menurut *Center for Civic Education* (1998) di Amerika Serikat diikat oleh konsepsi kebajikan dan budaya kewarganegaraan (*civic virtue and culture*) yang mencakup pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), watak kewarganegaraan (*civic disposition*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*), kepercayaan

kewarganegaraan (*civic confidence*), komitmen kewarganegaraan (*civic commitment*), dan kompetensi kewarganegaraan (*civic competence*). Karena itu, kajian PKn menjadi lebih luas dari pada embrionya, yakni kajian keilmuan PKn, program kurikuler PKn, dan aktivitas sosial-kultural. Implikasinya, secara aksiologis pengembangan PKn harus tetap berlandaskan ideologis Pancasila, landasan konstitusional UUD 1945, dan landasan operasional Undang-undang Sisdiknas yang berlaku saat ini, yakni UU Nomor 20 tahun 2003.

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan bidang studi yang bersifat *multifaset* dengan konteks lintas bidang keilmuan atau lebih dikenal dengan bidang kajian yang multidimensional sebagai integrasi dari disiplin ilmu politik, hukum, pendidikan, psikologi, dan disiplin ilmu lainnya yang dapat mendukung pembentukan warga negara yang baik. Namun secara filsafat keilmuan PKn memiliki *ontology* pokok ilmu politik khususnya konsep "*political democracy*" untuk aspek "*duties and rights of citizen*" (Chreshore, 1886). Dari ontologi pokok inilah berkembang konsep "*Civics*", yang di Indonesia diadaptasi menjadi Pendidikan Kewarganegaraan.

Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu bentuk dari domain kurikuler PKn. Sesuai dengan namanya, PKn merupakan mata pelajaran pada kurikulum SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK. Sebagai mata kuliah dalam program pendidikan tenaga kependidikan, PKn mempunyai misi sebagai pendidikan nilai Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan dan sebagai "*subject-specific pedagogy*" (pembelajaran materi subjek) untuk guru PKn. Sebagai mata pelajaran di tingkat satuan pendidikan, PKn mempunyai misi sebagai pendidikan nilai Pancasila dan kewarganegaraan untuk warga negara muda usia. Secara ontologis, mata pelajaran PKn berangkat dari nilai-nilai Pancasila dan konsepsi kewarganegaraan. Secara epistemologis, mata pelajaran PKn merupakan program pengembangan individu dan secara aksiologis mata pelajaran PKn bertujuan untuk pendewasaan peserta didik sebagai anggota masyarakat, warga negara, dan komponen bangsa Indonesia. Oleh karena itu, karakteristik kurikulum PKn yang dikembangkan selalu diarahkan dengan tujuan untuk mencapai target hingga terjadinya artikulasi proses "belajar tentang, melalui proses, dan untuk menumbuhkan demokrasi konstitusional Indonesia sesuai dengan UUD 1945", yang secara konseptual diadaptasi dari konsep "*learning about, through, and for democracy*" (Civitas, 1996, 2001; Kerr, 1996; Winataputra, 2001).

PKn untuk persekolahan sangat erat kaitannya dengan dua disiplin ilmu yang erat dengan kenegaraan, yakni Ilmu Politik dan Hukum. Kedua ilmu itu terintegrasi dengan humaniora dan dimensi keilmuan lainnya yang dikemas secara ilmiah dan pedagogis untuk kepentingan pembelajaran di sekolah. Karena itu, PKn di tingkat persekolahan bertujuan untuk mempersiapkan para peserta didik sebagai warga negara yang cerdas dan baik (*to be smart dan good citizen*). Warga negara yang dimaksud adalah warga negara yang menguasai pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skills*), sikap dan nilai (*attitudes and values*) yang dapat dimanfaatkan untuk menumbuhkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

Tujuan akhir dari pendidikan kewarganegaraan adalah warga Negara yang cerdas dan baik, yakni warga negara yang bercirikan tumbuh-kembangnya kepekaan, ketanggapan, kritisitas, dan kreativitas sosial dalam konteks kehidupan bermasyarakat secara tertib, damai, dan kreatif. Para peserta didik dikondisikan untuk selalu bersikap kritis dan berperilaku kreatif sebagai anggota keluarga, warga sekolah, anggota masyarakat, warga negara, dan umat manusia di lingkungannya yang cerdas dan baik. Proses pembelajaran diorganisasikan dalam bentuk belajar sambil berbuat (*learning by doing*), belajar memecahkan masalah sosial (*social problem solving learning*), belajar melalui partisipasi sosial (*socio-participatory learning*), dan belajar melalui interaksi sosial-kultural sesuai dengan konteks kehidupan masyarakat.

Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia seperti yang berkembang di negara lain memiliki multidimensional, artinya bahwa program PKn bukan hanya untuk satu tujuan. Winataputra (2001) mengemukakan bahwa ada tiga dimensi PKn, yakni PKn sebagai program kurikuler, PKn sebagai program akademik, dan PKn sebagai program sosial kultural. Dalam pelaksanaan program, ketiga dimensi ini dapat saja terjadi secara simultan atau secara bersamaan, khususnya dalam mencapai tujuan umum, yakni membentuk warga negara yang cerdas dan baik. Khusus untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tujuan PKn dapat dilihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada bagian Penjelasan Pasal 37 ayat (1) bahwa “Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air”

Adanya ketentuan tentang pendidikan kewarganegaraan dalam UU Sisdiknas sebagai mata pelajaran wajib pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi menunjukkan bahwa mata pelajaran PKn menempati kedudukan strategis dalam

mencapai tujuan pendidikan nasional di tanah air. Adapun arah pengembangannya hendaknya difokuskan pada pembentukan peserta didik agar menjadi manusia Indonesia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Arah pengembangan pendidikan nasional pada era reformasi mengacu pada UU Sisdiknas yang dioperasionalkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Sejalan dengan kebijakan otonomi pendidikan maka pengembangan kurikulum sekolah tidak lagi dibebankan kepada pemerintah pusat melainkan diserahkan kepada masing-masing satuan pendidikan. Pemerintah pusat melalui Departemen Pendidikan Nasional hanya menyediakan standar nasional, yakni berupa standar isi dan standar kompetensi lulusan sementara pelaksanaan pengembangan kurikulum dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan sesuai dengan jenjang dan jenisnya. Sebagai landasan kurikulumnya, pendidikan kewarganegaraan untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah mengacu pada Permendiknas Nomor 22 dan 23 Tahun 2006 masing-masing tentang SI dan SKL.

Berlakunya ketentuan otonomi pendidikan membawa implikasi bagi setiap satuan pendidikan termasuk implikasi dalam pengembangan kurikulum. Satuan Pendidikan memiliki kewenangan yang lebih besar dalam pengembangan kurikulum bahkan dalam pengelolaan bidang lainnya, namun di pihak lain mereka pun dituntut agar selalu meningkatkan kualitas satuan pendidikan yang sesuai dengan standar nasional.

b. Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan (*civic education*) adalah mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosio-kultural, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang dilandasi oleh Pancasila dan UUD 1945 (Departemen Pendidikan Nasional, 2005: 33).

Pendidikan Kewarganegaraan yang pertama adalah *civic*. Kurikulum yang berlaku pada awalnya adalah kurikulum 1968. Perkembangan zaman yang semakin cepat dan juga pendidikan maka akhirnya *civic* diganti dengan Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dengan dikeluarkannya kurikulum 1975. Pelajaran PMP ini lahir pada tahun ajaran 1975/1976 dengan visi dan misi berorientasi pada penanaman nilai (*Value Inculcation*) dengan muatan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Kondisi ini bertahan sampai disempurnakannya kurikulum PMP tahun 1975/1976 pada tahun 1984. PMP makin kaya dengan muatan baru Pedoman Pemahaman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) atau Eka Prasetya Pancakarsa dengan 36 butir nilai Pancasila. Kondisi tersebut terus

berlanjut sampai berubahnya kurikulum PMP 1984 menjadi kurikulum 1994. Pada tahun 2004 kurikulum 1994 yang dikenal dengan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) diubah dengan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), dengan sebutan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Dalam paradigma baru PKn memusatkan perhatian pada pengembangan kecerdasan warga negara dalam dimensi spiritual, rasional, emosional, dan sosial baik secara individu, sosial maupun sebagai pemimpin hari esok.

Sebagaimana lazimnya pada semua mata pelajaran, Pendidikan Kewarganegaraan memiliki visi, misi, tujuan, dan ruang lingkup isi. Visi mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan adalah terwujudnya suatu mata pelajaran yang berfungsi sebagai sarana pembinaan watak bangsa (*Nation and character building*) dan pemberdayaan warga negara. Dengan visi tersebut diupayakan pendidikan Kewarganegaraan mampu mewujudkan proses pendidikan yang terarah pada pengembangan kemampuan individu sehingga menjadi warga negara yang cerdas, partisipatif, dan bertanggung jawab, yang pada gilirannya mampu mendukung berkembangnya pendidikan masyarakat bangsa dan negara Indonesia yang cerdas (Depdiknas, 2006: 3).

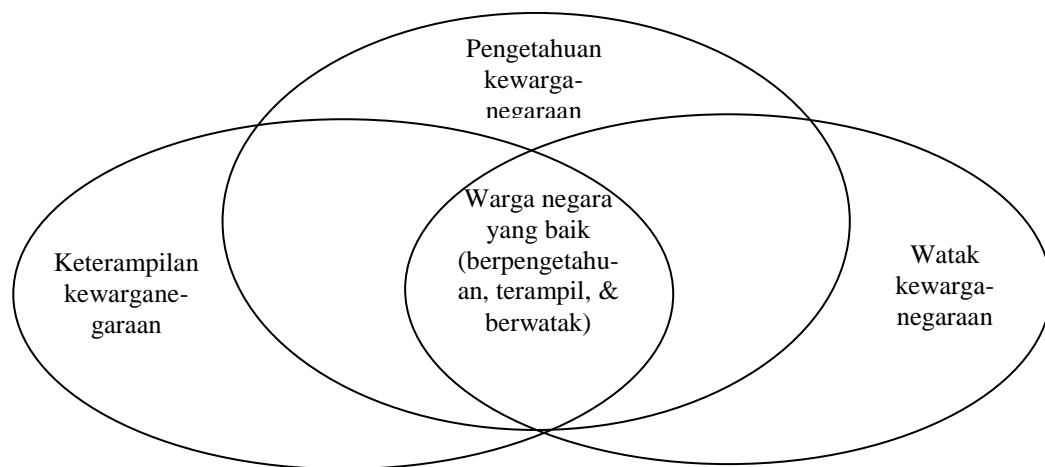
Sementara itu, misi atas mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan adalah membentuk warga negara yang baik, yakni warga negara yang sanggup melaksanakan hak dan kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 (Depdiknas, 2006:3). Dengan misi ini, diharapkan Pendidikan Kewarganegaraan dapat (a) memanfaatkan kenyataan dan kecenderungan masyarakat yang semakin transparan, tuntutan kembali mutu yang semakin mendesak dan proses demokrasi yang semakin intens dan meluas sebagai konteks dan orientasi pendidikan demokrasi, (b) memanfaatkan substansi berbagai disiplin ilmu yang relevan sebagai wahana paedagogis untuk menghasilkan dampak instruksional dan pengiringnya, dan (c) memanfaatkan berbagai konsep, prinsip, dan prosedur pembelajaran yang memungkinkan para peserta didik mampu belajar secara demokratis, dalam situasi yang demokratis dan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat yang lebih demokratis (Depdiknas, 2006: 3).

Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk mengembangkan potensi individu sebagai warga negara Indonesia sehingga mereka memiliki wawasan, sikap, dan keterampilan kewarganegaraan yang memadai, yang memungkinkan untuk berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung jawab dalam berbagai dimensi kehidupan (Depdiknas, 2005: 34). Sejalan dengan pernyataan ini, dalam Pedoman Pengembangan

Silabus Mata Pelajaran PKn diuraikan bahwa tujuan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk mengembangkan kompetensi sebagai berikut.

- 1) Memiliki kemampuan berfikir secara rasional, kritis, dan kreatif sehingga mampu memahami berbagai wacana kewarganegaraan.
- 2) Memiliki keterampilan intelektual dan keterampilan berpartisipasi secara demokratis dan bertanggung jawab.
- 3) Memiliki watak dan kepribadian yang baik sesuai dengan norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Depdiknas, 2006: 3).

Rumusan tujuan tersebut di atas sejalan dengan aspek-aspek kompetensi yang hendak dikembangkan dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Aspek-aspek tersebut mencakup pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarga-negaraan (*civic skills*), dan watak atau karakter kewarganegaraan (*civic dispositions*). Hal ini sejalan dengan analogi konsep dari Benjamin S.Bloom tentang pengembangan kemampuan siswa yang mencakup ranah kognitif, psikomotor, dan afektif. Cakupan aspek-aspek kompetensi dalam pembelajaran Pendidikan Kewarga-negaraan dapat digambarkan sebagaimana pada diagram berikut ini.



Gambar 1. Diagram Aspek-aspek Kompetensi dalam PKn

Aspek kompetensi pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) menyangkut kemampuan akademik-keilmuan yang dikembangkan dari berbagai teori dan konsep politik, hukum, dan moral. Ini berarti, mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan bidang kajian multidisipliner. Secara lebih terperinci materi pengetahuan kewarganegaraan meliputi pengetahuan tentang hak dan tanggung jawab warga negara, hak asasi manusia, prinsip-prinsip dan proses demokrasi, lembaga pemerintahan dan non pemerintahan, identitas nasional, pemerintahan berdasar hukum (*rule of law*) dan

peradilan yang bebas tidak memihak, konstitusi, serta nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat (Depdiknas, 2006: 4).

Keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) meliputi keterampilan intelektual (*intellectual skills*) dan keterampilan berpartisipasi (*participatory skills*) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contoh keterampilan intelektual adalah keterampilan dalam merespon berbagai persoalan politik, misalnya merancang dialog dengan DPRD. Contoh keterampilan berpartisipasi adalah keterampilan menggunakan hak dan kewajiban di bidang hukum, misalnya segera melapor kepada polisi atas terjadinya kejahatan yang diketahui (Depdiknas, 2006:5)

Watak kewarganegaraan (*civic dispositions*) sesungguhnya merupakan dimensi yang paling substantif dan esensial dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Dimensi watak atau karakter kewarganegaraan dapat dipandang sebagai “muara“ dari pengembangan kedua dimensi sebelumnya. Dengan memperhatikan visi, misi, dan tujuan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan maka karakteristik mata pelajaran ini ditandai dengan penekanan pada dimensi watak, karakter, sikap, dan potensi lain yang bersifat afektif (Depdiknas, 2006: 5).

Menurut Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dalam panduan KTSP 2006 disebutkan, bahwa ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan meliputi aspek-aspek berikut.

- 1) Persatuan dan Kesatuan bangsa, meliputi: hidup rukun dalam perbedaan, cinta lingkungan, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, sumpah pemuda, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, partisipasi dalam pembelaan negara, sikap positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, keterbukaan dan jaminan keadilan.
- 2) Norma, Hukum, dan Peraturan, meliputi: tertib dalam kehidupan keluarga, tata tertib di sekolah, norma yang berlaku di masyarakat, peraturan-peraturan daerah, norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sistim hukum dan peradilan nasional, hukum dan peradilan internasional.
- 3) Hak Asasi Manusia, meliputi: hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban anggota masyarakat, instrumen nasional dan internasional HAM, pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM.
- 4) Kebutuhan Warga Negara, meliputi: hidup gotong royong, harga diri sebagai warga masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan mengeluarkan pendapat, menghargai keputusan bersama, prestasi diri, persamaan kedudukan warga negara.

- 5) Konstitusi Negara, meliputi: proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, hubungan dasar negara dengan konstitusi.
- 6) Kekuasaan dan Politik, meliputi: pemerintahan desa dan kecamatan, pemerintahan daerah dan otonomi, pemerintah pusat, demokrasi dan sistem politik, budaya politik, budaya demokrasi menuju masyarakat madani, sistem pemerintahan, pers dalam masyarakat demokrasi.
- 7) Pancasila, meliputi: kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila sebagai ideologi terbuka.
- 8) Globalisasi, meliputi: globalisasi di lingkungannya, politik luar negeri Indonesia di era globalisasi, dampak globalisasi, hubungan internasional dan organisasi internasional, dan mengevaluasi globalisasi.

Berdasarkan pemahaman tersebut di atas maka seorang warga negara pertamanya perlu memiliki pengetahuan kewarganegaraan yang baik, terutama pengetahuan di bidang politik, hukum, dan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, seorang warga negara diharapkan memiliki keterampilan secara intelektual maupun secara partisipatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada akhirnya, pengetahuan dan keterampilannya itu akan membentuk suatu watak atau karakter yang mapan sehingga menjadi sikap atau kebiasaan hidup sehari-hari. Watak, karakter, sikap atau kebiasaan hidup sehari-hari yang mencerminkan warga negara yang baik itu misalnya sikap religius, jujur, adil, demokratis, menghargai perbedaan, menghormati hukum, menghormati hak orang lain, memiliki semangat kebangsaan yang kuat, memiliki rasa kesetiakawanan sosial, dan lain-lain.

2. Revitalisasi Nilai-nilai Pendidikan Pancasila

a. Revitalisasi

Revitalisasi secara bahasa berarti proses, cara atau tindakan untuk memvitalkan (menganggap penting) kembali (Hoetomo, 2003: 418). Revitalisasi juga diartikan sebagai peninjauan ulang mengenai suatu hal untuk ditata, digarap, dan disesuaikan agar lebih bermanfaat dalam arti luas (Hastanto, 2002: 1). Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa revitalisasi adalah suatu upaya membuat sesuatu (budaya) dengan meninjau ulang

akan kekurangannya untuk disesuaikan dengan kondisi zaman dalam upaya memenuhi kebutuhan yang lebih bermanfaat.

Konsep dalam revitalisasi ini menyarankan perlunya bukti-bukti yang mendorong revitalisasi tidak ditentukan secara individual karena masing-masing dari dorongan atau motivasi mereka memperkuat dan berpengaruh satu sama lain. Untuk memenuhi dorongan tersebut diperlukan kriteria untuk memperkuat dalam menentukan warisan budaya yang seharusnya direvitalisasi yang didasarkan pada filosofinya, kepercayaannya, sosio-budaya dan latar kesejarahan yang ditandai pada tradisi yang harmonis, teratur dengan kondisi lingkungan dan keindahan. Untuk masing-masing kriteria ini selalu berubah menurut persepsi masyarakatnya. Jika kriteria warisan budaya ini dapat dikelompokkan menurut posisi, makna, dan skala peranan maupun proses pemantapannya maka prioritas revitalisasi menjadi lebih mudah dilakukan.

Revitalisasi adalah upaya untuk memvitalkan kembali suatu kawasan atau bagian kota yang dulunya pernah vital/hidup tetapi kemudian mengalami kemunduran/ degradasi. Skala revitalisasi terbagi menjadi tingkatan makro dan mikro. Proses revitalisasi sebuah kawasan mencakup perbaikan aspek fisik, aspek ekonomi dan aspek sosial. Menurut Danisworo, (2002), pendekatan revitalisasi harus mampu mengenali dan memanfaatkan potensi lingkungan (sejarah, makna, keunikan lokasi dan citra tempat). Pengertian menurut Departemen Kimpraswil (2005), revitalisasi adalah upaya untuk menghidupkan kembali kawasan yang mati, yang pada masa silam penuh hidup atau mengendalikan, dan mengembangkan kawasan untuk menemukan kembali potensi yang dimiliki atau pernah dimiliki atau seharusnya dimiliki oleh sebuah kota. Menurut Hasan (2001), revitalisasi bertujuan untuk 1) menghidupkan kembali kawasan pusat kota yang memudar atau menurun kualitas lingkungannya, 2) meningkatkan nilai ekonomis kawasan yang strategis, 3) merangsang pertumbuhan daerah sekitarnya, 4) mendorong peningkatan ekonomi lokal dari dunia usaha dan masyarakat, 5) memperkuat identitas kawasan, dan 6) mendukung pembentukan citra kota.

Revitalisasi sendiri bukan sesuatu yang hanya berorientasi pada penyelesaian keindahan fisik tetapi harus dilengkapi dengan peningkatan ekonomi masyarakatnya serta pengenalan budaya yang ada. Untuk melaksanakan revitalisasi perlu adanya keterlibatan masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, revitalisasi berarti proses, cara, dan perbuatan menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya kurang terberdaya. Revitalisasi berarti menjadikan sesuatu atau perbuatan menjadi vital. Kata vital

mempunyai arti sangat penting atau perlu sekali (untuk kehidupan dan sebagainya). Dengan demikian, secara lebih jelas revitalisasi pada hakikatnya adalah membangkitkan kembali vitalitas atau usaha-usaha untuk menjadikan sesuatu itu menjadi penting dan perlu sekali.

b. Sejarah Pancasila

Perkataan Pancasila pada mulanya dipergunakan oleh pemeluk agama Budha di India. Ajaran Budha memuat berbagai ajaran moral di mana untuk setiap golongan berbeda kewajiban moralnya, seperti: Dasa-syila, Sapta-syila, dan Panca-syila. Ajaran Pancasila menurut Budha dimaksudkan sebagai lima aturan atau "*Five Moral Principles*" yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh para penganut agama Budha biasa.

Masuknya kebudayaan India ke Indonesia melalui penyebaran agama Hindhu dan Budha menjadikan ajaran "Pancasila" Budhisme masuk ke dalam kepustakaan Jawa, terutama pada jaman kerajaan Majapahit. Kata Pancasila dalam khasanah kesusasteraan Majapahit di bawah Raja Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada ditemukan dalam keropak "Negara Kertagama" yang berupa kakawin (syair pujian) dalam pujangga istana bernama Empu Prapanca, di mana dapat ditemukan dalam sarga bait ke-2 sebagai berikut: "Yatnaggegwani panca-syila kertasangkara bhisekaka krama", artinya Raja menjalankan dengan setia kelima pantangan (Pancasila) itu, begitu pula dalam upacara-upacara ibadat dan penobatan-penobatan.

Selanjutnya, dalam buku Sutasoma karangan Empu Tantular, istilah Pancasila diartikan "berbatu sendi yang lima" (Soegito, 1999) yang berarti pelaksanaan kesusilaan yang lima (Pancasila Krama), yang isinya tidak boleh melakukan kekerasan, mencuri, berjiwa dengki, berbohong, dan tidak boleh minum-minuman keras.

Pada jaman Majapahit, kepercayaan tradisi Agama Hindu Syiwa dan Agama Budha Mahayana serta campurannya Tantrayana hidup berdampingan secara damai. Setelah Majapahit runtuh dan agama Islam mulai tersebar ke seluruh penjuru tanah air, sisa-sisa pengaruh ajaran "Moral Budha" (Pancasila) masih dikenal di masyarakat Jawa. Dalam pada itu muncul lima larangan, yang isinya berupa larangan: mateni (membunuh), maling (mencuri), madon (berzina), mabok (minum-minuman keras), dan main (judi). Semua huruf dalam ajaran moral tersebut dimulai dengan huruf "M" atau dalam bahasa Jawa disebut "Ma". Karena itu lima prinsip moral tersebut sering dinamakan sebagai "Ma-Lima", yaitu lima larangan.

Kemudian, istilah Pancasila muncul kembali, yaitu pada tanggal 1 Juni 1945 ketika Ir. Soekarno berpidato di sidang hari ketiga Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam pidatonya, Soekarno mengusulkan lima hal untuk menjadi Dasar Negara Indonesia Merdeka dan memberi nama Pancasila. Demikianlah gambaran singkat tentang sejarah Pancasila selanjutnya bagaimana dengan hakikat Pancasila.

Bagi bangsa Indonesia, Pancasila hakikatnya adalah sebagai dasar Negara (filsafat negara) sekaligus sebagai pandangan hidup (filsafat hidup) bangsa. Memahami hakikat Pancasila berarti memahami makna pokok dari nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua kedudukan dan fungsi tersebut bersifat hakiki. Karena itu, berbagai kedudukan dan fungsi Pancasila yang lain, seperti sebagai jiwa dan kepribadian bangsa, ideologi nasional, perjanjian luhur, tujuan bangsa, termasuk sebagai norma dasar dan kriteria dasar watak/ kepribadian manusia Indonesia semuanya dapat dikembalikan pada sifat hakiki tersebut. Berdasarkan kedudukan nilai Pancasila yang hakiki itu lahir berbagai nilai dan fungsi Pancasila yang melandasi tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Di dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (vide Pasal 37 UU No.20 tahun 2003) Pancasila tidak lagi dicantumkan sebagai mata kuliah wajib pada kurikulum pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan tinggi. Hal ini menimbulkan kegoncangan paradigmatis. Di dalam Pasal 2 UU No. 20 tahun 2003 disebutkan bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 namun dalam Pasal 37 UU No. 20 tahun 2003 tidak mewajibkan Pendidikan Pancasila diberikan pada para siswa maka Pancasila hanya bersifat fakultatif bukan merupakan suatu *conditio sine quanon*. Secara esensial seharusnya Pancasila dijadikan sebagai dasar atau landasan berpijak yang ideal untuk memahami fondasi filosofis, sosiologis, dan kultural dari berbagai ilmu pengetahuan, pengembangan relasi iman dan ilmu.

c. Nilai-nilai Pancasila

Rumusan Pancasila secara material memuat nilai-nilai manusiawi sedangkan sebagai dasar Negara, Pancasila memiliki ciri khas yang hanya dimiliki bangsa Indonesia. Atas dasar itu maka keberadaan Pancasila pada hakekatnya adalah nilai-nilai yang berharga, yang memuat nilai-nilai dasar manusiawi dan nilai-nilai kodrati yang melekat pada setiap individu manusia diterima oleh Bangsa Indonesia (Wahono, 2011:73).

Notonagoro membahas tentang Pancasila, bahwa sifat manusia sesuai dengan sifatnya manusia memiliki sifat individual dan sekaligus sebagai makhluk sosial. Dengan memaknai nilai-nilai dasar manusiawi tersebut, wajar bahwa nilai-nilai Pancasila dapat diterima oleh seluruh bangsa Indonesia sebagai bangsa yang memiliki landasan hubungan antara manusia dengan Tuhan penciptanya, dengan sesamanya, dan dengan lingkungan alamnya (Notonagoro, 1987: 12-23)

Sejak awal pembentukannya ideologi Pancasila merupakan ideologi dari, oleh, dan untuk bangsa Indonesia. Pancasila merupakan falsafah dan pandangan hidup bangsa secara operasional dijadikan ideologi bangsa Indonesia. Pancasila merupakan konsensus politik yang menjanjikan suatu komitmen untuk bersatu dalam sikap dan pandangan guna mewujudkan tujuan Nasional (Wahono, 2011: 91-92)

Nilai-nilai yang telah disepakati mewajibkan bangsa Indonesia untuk mewujudkan sesuai dengan situasi dan kondisi nyata serta menghindari perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar. Sebagai ideologi terbuka Pancasila memiliki keterbukaan, keluwesan yang harus diterima dan dilaksanakan oleh seluruh golongan yang ada di Indonesia. Pancasila sebagai ideologi nasional harus mampu memberikan wawasan, asas dan pedoman normatif bagi seluruh aspek serta dijabarkan menjadi norma moral dan norma hukum.

d. Implementasi Nilai-nilai Pancasila

Pancasila memiliki kedudukan sebagai dasar negara karena memuat azas-azas yang dijadikan dasar bagi berdirinya negara Indonesia. Sebagai dasar filsafat Negara, rumusan Pancasila merupakan satu kesatuan rumusan yang sistematis, artinya sila-silanya tidak bertentangan dan saling mendukung satu dengan yang lain. Pancasila sebagai satu kesatuan, harus dipahami secara menyeluruh, dan dalam pelaksanaannya tidak boleh mengabaikan sila-sila lainnya.

Pancasila memiliki rumusan yang abstrak, umum, universal bertumpu pada realitas yang dapat dipahami bersama oleh seluruh bangsa Indonesia. Dengan demikian Pancasila dapat dijadikan sebagai azas persatuan, kesatuan damai, dan kerjasama bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila yang digali para pendiri bangsa merupakan hasil dari proses pemikiran yang panjang untuk menentukan jati diri dan falsafah pandangan hidup bangsa Indonesia. Menyikapi dinamika dan tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara yang multi kompleks maka agar falsafah pandangan hidup bangsa tetap terwujud, nilai-nilai

Pancasila harus menjadi dasar dalam mencapai tujuan nasional. Nilai-nilai Pancasila dimaknai dan diimplementasikan secara nyata dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat dan mewujudkan keadilan sosial.

Akselerasi Sosialisasi Nilai-nilai Pancasila sebagai Ideologi Nasional. Ideologi Pancasila selayaknya disosialisasikan secara sederhana, jelas, praktis, dan terus menerus baik dalam pemikiran, perkataan, perilaku dan keteladanan sehingga mampu menarik dan mengetuk hati setiap rakyat Indonesia. Ideologi Pancasila tetap menghormati hak individu dan martabat manusia. Pada perkembangan ke depan, ideologi Pancasila tidak menerapkan cara-cara indoktrinasi melainkan menggunakan cara persuasif dan dialog sehingga mampu berperan dan membimbing semua warga negara secara bersama dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara secara sadar, ikhlas dan menaati serta mengamalkan kelima sila dari Pancasila. Ideologi Pancasila memaklumi adanya perubahan nilai sebagai indikator dan adanya dinamika masyarakat dalam mencapai tujuan nasional (Wahana, 2011: 99).

e. Tujuan Pendidikan Pancasila

Sejak awal proklamasi kemerdekaan Indonesia, saat terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia bangsa Indonesia telah menyepakati bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Kesepakatan inilah yang menjadi perjanjian luhur atau konsensus nasional bangsa Indonesia yang selalu dijunjung tinggi bersama. Dengan menunjuk pengertian Pancasila sebagaimana tersebut maka menjadi jelas bahwa Pancasila harus dimengerti, dipahami, dihayati dan kemudian diamalkan dalam kehidupan nyata oleh setiap warganegara. Oleh karena itu tujuan mempelajari Pancasila pada hakikatnya adalah mengerti dan memahami arti dan isi Pancasila dengan sebenar-benarnya, menghayati dan mengamalkan semua sila sebaik-baiknya, serta mengamankan dan menyelamatkan Pancasila dari setiap usaha yang hendak merongrong atau menggantinya.

Mengerti dan memahami Pancasila yang benar berarti memahami Pancasila yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara yuridis konstitusional maupun secara obyektif ilmiah. Secara yuridis konstitusional karena Pancasila adalah dasar yang dipergunakan untuk mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan negara. Secara objektif, bahwa setiap warga Negara tidak boleh memberikan pengertian dan penafsiran sendiri.

Upaya menjaga dan melestarikan Pancasila dilakukan secara preventif dan represif. Usaha pengamanan preventif antara lain melakukan usaha meningkatkan pengertian, pemahaman, penghayatan dan pengamalannya melalui pendidikan,

penerangan, pembinaan kesadaran nasional, pembinaan kesadaran wawasan nusantara dan usaha-usaha pencegahan lainnya. Upaya pengamanan secara represif berupa penindakan terhadap bahaya yang mengancam baik dari dalam maupun dari luar negeri.

Kemudian, dalam pelaksanaannya, pendidikan nasional diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Indonesia. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis yang bertanggungjawab (Pasal 3).

Dalam undang-undang tersebut juga dinyatakan bahwa kurikulum dan isi pendidikan yang memuat Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama dan Pendidikan Kewarganegaraan terus ditingkatkan dan dikembangkan di semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan. Dengan demikian Pendidikan Pancasila di Sekolah Menengah perlu terus menerus ditingkatkan ketepatan materi instruksionalnya, dikembangkan kecocokan metodologi pengajarannya, dan dibenahi efektivitas manajemen pembelajarannya termasuk kualitasnya. Dalam operasionalnya, ketiga muatan tersebut menjadi menu wajib dari kurikulum yang berlaku secara nasional.

Berdasarkan asas pemikiran tersebut di atas, maka pendidikan Pancasila perlu dilaksanakan di semua jenjang pendidikan baik negeri maupun swasta. Kompetensi lulusan pendidikan Pancasila yang diharapkan adalah suatu tindakan yang intelegen, penuh tanggung jawab dan sebagai seorang warga negara mampu memecahkan berbagai masalah hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan menerapkan pemikiran berlandaskan Pancasila. Sifat intelegen yang dimaksudkan tampak pada kemahiran, ketepatan dan keberhasilan bertindak, sedangkan sifat penuh tanggung jawab diperlihatkan sebagai kebenaran tindakan dilihat dari iptek, etika ataupun kepatutan agama dan budaya.

3. Sistem Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Budaya Jawa

a. Sistem Nilai Budaya

Sistem nilai budaya merupakan pedoman yang dianut oleh setiap anggota masyarakat terutama dalam bersikap dan berperilaku dan juga menjadi patokan untuk

menilai dan mencermati bagaimana individu dan kelompok bertindak dan berperilaku. Sistem nilai dapat dikatakan sebagai norma standar dalam kehidupan bermasyarakat. Djajasudarma dkk. (2002:13) mengemukakan bahwa sistem nilai begitu kuat meresap dan berakar di dalam jiwa masyarakat sehingga sulit diganti atau diubah dalam waktu singkat.

Nilai-nilai yang diyakini dan terinternalisasi dalam diri individu sehingga terhayati dalam setiap perilaku disebut juga sebagai kearifan lokal. Secara substansial, kearifan lokal adalah nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan menjadi acuan dalam bertingkah-laku masyarakat setempat.

Dengan demikian, perlu digagas dan dirumuskan model pendidikan karakter berbasis kearifan budaya lokal bagi masyarakat Indonesia yang majemuk secara budaya ini. Kearifan lokal merupakan pengetahuan lokal yang tercipta dari hasil adaptasi suatu komunitas yang berasal dari pengalaman hidup yang dikomunikasikan dari generasi ke generasi. Proses regenerasi kearifan lokal dilakukan melalui tradisi lisan (cerita rakyat) dan karya-karya sastra, seperti *babad*, *suluk*, *tembang*, *hikayat*, *lontar* dan lain sebagainya (Gunawan, 2008).

Soebadio (1986:18-25) menjelaskan pengertian kearifan lokal sama dengan *cultural identify* yang diartikan sebagai identitas budaya bangsa. Adapun identitas nasional menurut Barker (2005:260) merupakan bentuk identifikasi imajinatif dengan simbol dan wacana negara bangsa. Bangsa bukan sekadar formasi politik melainkan sistem representasi kultural tempat identitas nasional terus-menerus direproduksi sebagai tindakan diskursif.

Sistem nilai budaya dalam semua kebudayaan di dunia ini menurut Kluckhohn mengandung lima masalah pokok dalam kehidupan manusia, yakni sebagai berikut.

- 1) Hakikat hidup manusia. Hakekat hidup untuk setiap kebudayaan berbeda secara ekstrim, ada yang berusaha untuk memadamkan hidup, ada pula yang dengan pola-pola kelakuan tertentu menganggap hidup sebagai suatu hal yang baik untuk mengisi hidup.
- 2) Hakekat karya manusia. Setiap kebudayaan hakekatnya berbeda-beda, di antaranya ada yang beranggapan bahwa karya bertujuan untuk hidup, karya memberikan kedudukan, karya merupakan gerak hidup, karya merupakan gerak hidup untuk menambah karya lagi.

- 3) Hakekat waktu manusia. Hakekat waktu untuk setiap kebudayaan berbeda, ada yang berpandangan mementingkan orientasi masa lampau, ada pula yang berpandangan untuk masa kini atau yang akan datang.
- 4) Hakekat alam manusia. Ada kebudayaan yang menganggap manusia harus mengeksploitasi alam atau memanfaatkan alam semaksimal mungkin, ada pula kebudayaan yang beranggapan bahwa manusia harus harmonis dengan alam dan manusia harus menyerah kepada alam.
- 5) Masalah hubungan manusia. Dalam hal ini ada yang mementingkan hubungan manusia dengan manusia, baik secara horizontal (sesamanya) maupun secara vertikal.

Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa sistem nilai budaya merupakan masalah dasar dalam hidup manusia sehingga berfungsi sebagai pedoman yang memberikan arah dan orientasi kepada kehidupan warga masyarakat. Sistem nilai budaya adalah kompleks ide-ide dan gagasan manusia yang menjadi sumber inspirasi dan orientasi dalam menghadapi masalah kehidupan manusia. Orientasi ini mengkrystal kuat sebagai jiwa dari suatu masyarakat dan saling berkaitan menjadi suatu sistem yang berpola (*habit of thinking*).

b. Kearifan Lokal Budaya Jawa

1) Pengertian Kearifan Lokal

Secara umum, *local wisdom* (kearifan setempat) dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Menurut Nurjaya (2006: 2-4) kearifan lokal pada hakikatnya berpangkal dari sistem nilai dan religi yang dianut dalam komunitasnya. Ajaran agama dan kepercayaan masyarakat lokal menjiwai dan memberi warna serta mempengaruhi citra lingkungan dalam wujud sikap dan perilaku terhadap lingkungannya. Hakikat yang terkandung di dalamnya adalah memberi tuntunan kepada manusia untuk berperilaku yang serasi dan selaras dengan irama alam semesta sehingga tercipta keseimbangan hubungan antara manusia dengan alam lingkungannya.

Kearifan lokal menurut Wales diartikan sebagai "*the sum of the cultural characteristics which the vast majority of a people have in common as result of their experiences in early life*" (dalam Atmodjo, 1986:46). Berdasarkan rumusan tersebut, menjadi jelas bahwa lokal yang dimaksud Wales merupakan substrat kebudayaan Pra-Indian atau yang disebut sebagai "Pribumi" (Poespowardojo, 1986: 30). Kearifan lokal juga dapat diartikan sebagai *local development*, yaitu perkembangan setempat yang arahnya menuju ke arah

perubahan. Kearifan lokal dan perkembangan lokal berkembang setelah terjadinya kontak kebudayaan atau akulturasi dengan kebudayaan lain, terutama yang datang dari India (kebudayaan Hindu). Namun unsur-unsur asli pada zaman pra-Hindu juga mempunyai daya gerak penting yang menentukan sehingga unsur-unsur asli tersebut tidak hilang. Kearifan lokal bangsa Indonesia merupakan kemampuan penyerapan kebudayaan asing yang datang secara selektif, artinya disesuaikan dengan suasana dan kondisi setempat (Atmodjo, 1986:47)

Dengan demikian secara substansial, kearifan lokal adalah nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat. Nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan menjadi acuan dalam bertingkah-laku sehari-hari masyarakat setempat. Sebagaimana dikatakan Geertz (1963: 26) bahwa kearifan lokal merupakan entitas yang sangat menentukan harkat dan martabat manusia dalam komunitasnya. Hal itu berarti kearifan lokal yang di dalamnya berisi unsur kecerdasan kreativitas dan pengetahuan lokal dari para elit dan masyarakatnya adalah yang menentukan dalam pembangunan peradaban masyarakat.

Dari konsep tersebut maka kearifan lokal sering dikonsepsikan sebagai kebijakan setempat (*local wisdom*), pengetahuan setempat (*local knowledge*) atau kecerdasan setempat (*local genius*). Kearifan lokal adalah sikap, pandangan, dan kemampuan suatu komunitas di dalam mengelola lingkungan rohani dan jasmaninya, yang memberikan kepada komunitas itu daya-tahan dan daya tumbuh di dalam wilayah dimana komunitas itu berada. Dengan kata lain kearifan lokal adalah jawaban kreatif terhadap situasi geografis-geopolitis, historis, dan situasional yang bersifat lokal. Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Kearifan lokal pada dasarnya dapat dipandang sebagai landasan bagi pembentukan jati diri bangsa secara nasional. Upaya menemukan identitas bangsa yang baru atas dasar kearifan lokal merupakan hal yang penting demi penyatuan kebudayaan bangsa di atas dasar identitas sejumlah etnik yang mewarnai Nusantara ini.

Identitas nasional menurut Barker (2005:260) merupakan bentuk identifikasi imajinatif dengan simbol dan wacana negara bangsa. Jadi bangsa bukan sekadar formasi politik melainkan sistem representasi kultural tempat identitas nasional terus menerus direproduksi sebagai tindakan diskursif. Negara bangsa sebagai aparatur politik dan bentuk simbolis memiliki dimensi waktu, dalam arti struktur politik terus hidup dan

berubah sementara dimensi simbolis dan diskursif identitas nasional terus menceritakan dan menciptakan gagasan mengenai asal usul, kesinambungan, dan tradisi.

Pengembangan kearifan lokal yang mencakup semua aspek kehidupan, termasuk pengelolaan lingkungan alam terbukti mampu menjadikan masyarakat yang mengembangkannya tetap bertahan hidup. Kearifan lokal juga bersifat dinamis dan dapat beradaptasi dengan sistem pengetahuan dan teknologi dari luar yang selalu bertambah sehingga sistem luar/modern itu dapat sepadan (*match*) dengan kondisi lokal. Sesuai dengan uraian tersebut maka kearifan lokal dikonsepsikan sebagai kebijakan setempat “*local wisdom*” adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Sistem pemenuhan kebutuhan mereka pasti meliputi seluruh unsur kehidupan; agama, ilmu pengetahuan, ekonomi, teknologi, organisasi sosial, bahasa dan komunikasi, serta kesenian (tujuh unsur kebudayaan menurut Koentjaraningrat). Mereka mempunyai pemahaman, program, kegiatan, pelaksanaan terkait untuk mempertahankan, memperbaiki, dan mengembangkan unsur kebutuhan mereka itu dengan memperhatikan ekosistem serta sumberdaya manusia yang terdapat pada warga mereka sendiri sehingga tercapainya keselarasan dan keserasian antara manusia dan alam lingkungannya sebagai implementasi pengabdian kepada yang Maha Kuasa.

Kearifan lokal dapat dijadikan jembatan yang menghubungkan masa lalu dan masa sekarang, generasi nenek moyang dan generasi sekarang demi menyiapkan masa depan. Pada gilirannya, kearifan lokal dapat dijadikan semacam simpul perekat dan pemersatu antar generasi. Dengan selalu memperhitungkan kearifan lokal melalui pendidikan budaya niscaya peserta didik diharapkan tidak terperangkap dalam situasi keterasingan atau menjadi ‘orang lain’ dari realitas dirinya dalam pengertian “menjadi seperti (orang lain)”. Menggali dan menanamkan kembali kearifan lokal secara inheren melalui pendidikan dapat dikatakan sebagai gerakan kembali pada basis nilai budaya daerahnya sendiri sebagai bagian upaya membangun identitas bangsa, dan, sebagai semacam filter dalam menyeleksi pengaruh budaya “lain”. Nilai-nilai kearifan lokal itu meniscayakan fungsi yang strategis bagi pembentukan karakter dan identitas bangsa.

Pendidikan berbasis kearifan lokal dapat dikatakan sebagai model pendidikan yang memiliki relevansi tinggi bagi pengembangan kecakapan hidup (*life skills*) dengan bertumpu pada pemberdayaan keterampilan dan potensi lokal di masing-masing daerah.

Materi pembelajaran harus memiliki makna dan relevansi tinggi terhadap pemberdayaan hidup mereka secara nyata berdasarkan realitas yang mereka hadapi. Kurikulum disiapkan sesuai dengan kondisi lingkungan hidup, minat, dan kondisi peserta didik. Juga harus memperhatikan kendala-kendala sosiologis dan kultural yang mereka hadapi. Pendidikan berbasis kearifan lokal adalah pendidikan yang mengajarkan peserta didik untuk selalu lekat dengan situasi konkret yang mereka hadapi.

2) Fungsi Kearifan Lokal

Kearifan lokal dipandang sangat bernilai dan mempunyai manfaat tersendiri dalam kehidupan masyarakat, setidaknya bagi masyarakat pemilikinya. Kearifan lokal dikembangkan karena adanya kebutuhan untuk menghayati, mempertahankan, dan melangsungkan hidup sesuai dengan situasi, kondisi, kemampuan dan tata nilai yang dihayati di dalam masyarakat. Dengan kata lain, kearifan lokal itu kemudian menjadi bagian dari cara hidup mereka yang arif, untuk memecahkan segala permasalahan hidup yang mereka hadapi. Berkat kearifan lokal mereka dapat melangsungkan kehidupannya bahkan dapat berkembang secara berkelanjutan (*sustainable development*).

Kearifan lokal merupakan pengetahuan yang eksplisit yang muncul dari periode panjang yang berevolusi bersama-sama masyarakat dan lingkungannya dalam lingkup lokal yang sudah dialami bersama-sama. Oleh karena itu kearifan lokal tidak sekadar sebagai acuan tingkah-laku seseorang tetapi lebih jauh, yaitu mampu mendinamisasi kehidupan masyarakat yang penuh keadaban. Kearifan lokal dilandasi oleh suasana kebatinan masyarakatnya akan suatu nilai sakral (religius) sehingga mampu untuk dijadikan sistem nilai.

Kearifan lokal pada umumnya berbentuk oral (tradisi lisan), berkembang di daerah pedesaan bahkan pedalaman yang terpencil dan biasa disebut masih bersifat tradisional tersebut memang tidak/belum didasarkan pada metode tertentu yang bersifat sistemik, apalagi bersifat ilmiah. Kearifan lokal tidak pernah dapat dipahami dan disimpan secara sistematis sehingga akibatnya akan punah. Kearifan lokal tidak dapat diukur dari inteligensi praktis. Lebih dari itu, kearifan pun begitu mempertimbangkan pentingnya perhatian kita kepada orang lain lebih dari sekedar kepentingan diri sendiri, kearifan local adalah pengetahuan informal yang tidak diajarkan disekolah seperti tradisi di mana pengetahuan formal dipelajari dan diprioritaskan. Kearifan akan memediasi nilai yang didukung oleh kinerja intelegensi praktis. Dengan demikian kearifan menopang asumsi pada diri sendiri, juga melihat sisi baik orang lain dan memperhatikan konteks

lingkungan, merangkai keseimbangan dari kepentingan sendiri (intrapersonal) dengan mempertimbangkan kepentingan orang lain (interpersonal) dan aspek lain, yakni lingkungan sosial.

Sejalan dengan kemajuan sosial-ekonomi, tata-cara atau teknik yang mereka gunakan untuk memproses penemuan-penemuan itu juga berkembang. Karena itu, secara perlahan mereka menciptakan 'metode' untuk membangun pengetahuan yang pada dasarnya merupakan cara-cara atau teknologi asli (*indigenous ways*) mendayagunakan sumber daya alam bagi kelangsungan kehidupan. Mereka mengembangkan suatu sistem pengetahuan dan teknologi yang asli suatu kearifan lokal (*indigenous or local knowledge*), yang mencakup berbagai macam topik seperti masalah pengobatan tradisional, masalah pangan dan pengolahan pangan, pemeliharaan ternak, pengelolaan air bersih, konservasi tanah, serta pencegahan hama dan penyakit tanaman. Secara lebih jelas kearifan merupakan aplikasi antara pengetahuan yang paling dalam dengan pengetahuan eksplisit sebagai mediasi nilai untuk pencapaian kebaikan bersama melalui keseimbangan diantara faktor individu, masyarakat dan lingkungannya.

Hasil akhir dari kearifan lokal adalah pengetahuan yang menggambarkan tentang kearifan lokal, yaitu gambaran mengenai sikap atau tingkah laku yang mencerminkan budaya asli. Nilai-nilai yang diyakini bersama dan terinternalisasi dalam diri individu sehingga terhayati dalam setiap perilaku, disebut juga sebagai kearifan lokal. Secara substansial, kearifan lokal itu adalah nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan menjadi acuan dalam bertingkah-laku masyarakat setempat (Nurjaya, 2006: 2-4)

Kearifan lingkungan masyarakat adat/lokal pada hakikatnya berpangkal dari sistem nilai dan religi yang dianut dalam komunitasnya. Ajaran agama dan kepercayaan masyarakat lokal menjiwai dan memberi warna serta mempengaruhi citra lingkungannya dalam wujud sikap dan perilaku terhadap lingkungannya. Hakikat yang terkandung di dalamnya adalah memberi tuntunan kepada manusia untuk berperilaku yang serasi dan selaras dengan irama alam semesta, sehingga tercipta keseimbangan hubungan antara manusia dengan alam lingkungannya.

Setiap suku bangsa Indonesia yang bhinneka memiliki nilai-nilai budaya luhur dan memiliki keunggulan lokal atau memiliki kearifan lokal. Menurut Alwasilah (2009:16) kearifan lokal inilah yang melahirkan pendidikan bermakna *deliberative*, yakni bahwa "setiap masyarakat berusaha mentransmisikan gagasan fundamental yang berkenaan dengan hakikat dunia, pengetahuan, dan nilai-nilai". Kesadaran sangat dibutuhkan karena

praktik pendidikan selama ini terlalu berorientasi ke Barat dan melupakan nilai-nilai keunggulan yang ada di Bumi Nusantara. Seperti dikemukakan Kartadinata (dalam Pengantar Buku Etnopedagogi karangan Alwasilah dkk., 2009) bahwa "di antara kita selama ini silau dengan sistem pendidikan Barat sehingga buta terhadap keunggulan lokal yang lama terpendam dalam bumi kebudayaan Indonesia... dan UPI merespon dengan menggagas etnopedagogi". Etnopedagogi adalah praktik pendidikan berbasis kearifan lokal. Dengan kata lain "kearifan lokal adalah proses bagaimana pengetahuan dihasilkan, disimpan, diterapkan, dan diwariskan" (Alwasilah, 2009: 50-51).

3) Kearifan Lokal Budaya Jawa

Secara umum kebudayaan Jawa dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu kebudayaan pedalaman dan pesisir. Daerah pedalaman Jawa berpusat di Yogyakarta dan Surakarta atau disebut wilayah kebudayaan Jawa *Negarigung*. Sedangkan "kebudayaan pesisiran" meliputi daerah pesisir pantai utara Jawa yang berpusat di wilayah Pati, Blambangan, dan Tegal (Sukmawati: 2004:12).

Geertz (1981: X-XII) menggambarkan masyarakat Jawa terutama yang berada di wilayah kebudayaan Jawa *Negara gung* memiliki pandangan hidup atau falsafah dalam memahami makna kehidupan sehingga mempunyai pedoman dalam melakukan tindakan. Pandangan orang Jawa dalam melihat, memahami, dan berperilaku berorientasi dan bersumber dari budaya. Karena itu perkembangan budaya Jawa selaras dengan dinamika masyarakat yang mengacu pada konsep budaya induk, yaitu "*sangkan paraning dumadi*" (dari mana dan mau ke mana kita) menunjukkan bahwa hidup bagi orang Jawa adalah sebuah "*lelaku*" (perjalanan). Karena itu, hidup di dunia harus memahami dari mana 'asal', akan ke mana 'tujuan' dan 'akhir' perjalanan hidupnya untuk mencapai "*kasampurnaning dumadi*" (kesempurnaan tujuan hidup) sehingga dianggap "*wingkan sangkan ing paran*". Masyarakat Jawa mengartikan kata "Jawa" bermakna mengerti atau paham. Karena itu, di dalam keseharian sering terdengar masyarakat Jawa melontarkan ungkapan seperti: '*durung jawa*' (belum paham), "*wis jawa*" (sudah paham) atau '*wis ora jawa*' (berubah sombong atau atau buruk).

Mulder (1985: 31) berpendapat bahwa untuk mencapai "*kasampurnaning dumadi*" orang harus sudah memahami dan menjalankan konsep '*Manunggaling Kawula Gusti*', yakni konsep religiusitas hubungan manusia dengan Tuhan. *Manunggal* artinya 'menyatu' sedangkan *kawula* adalah 'hamba' dan *Gusti* adalah 'Tuhan', konsep ini hendaknya diterima sebagai nilai-nilai spiritual yang menyatukan kehendak dari seorang hamba

dengan 'Penciptanya'. Penyatuan diri itu dilakukan manusia ketika masih hidup di dunia sehingga seluruh perjalanan hidupnya dari lahir hingga ke liang kubur dalam tataran konsep Tuhan. Orang-orang yang mengejawantahkan konsep "*manunggaling kawula Gusti*" tidak akan melakukan hal-hal di luar keinginan Tuhan. Penerapan konsep ini di dalam lingkungan rumah tangga, di masyarakat maupun di birokrasi akan melahirkan keluarga harmonis, sejahtera lahir dan batin, masyarakat yang saling hormat-menghormati akan melahirkan negeri "*gemah ripah loh jinawi*". Konsep dikenal dengan istilah "*nunggak semi*", artinya senantiasa tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Karena itu dalam setiap diri individu ditanamkan sikap '*andhap asor*' yang tercermin dalam sikap menjalani laku '*nrimo*' (menerima apa adanya) '*rilo*' (rela dan ikhlas) dan '*sabar*' (tidak gampang marah).

Menurut Soeseno (2000: 76) kebudayaan Jawa selalu berhubungan dengan nilai-nilai falsafah kejiwaan maupun pola pikir. Hal yang bersifat filsafati terletak pada nilai-nilai simbolisme akibat adanya kontak antara manusia dengan mikro-makro kosmos, antara kehidupan lahir dan bathinnya yang disebut "*Kejawen*". Titik berat yang melatarbelakangi kejawen disebut '*ngilmu*' sehingga ilmu kejawen dapat menembus lingkungan bersifat umum dan universal.

Dalam tataran epistemologis, ilmu pengetahuan dinilai sebagai sebuah "*kawruh*", maka kegiatan seseorang untuk mencari dan mendapatkan ilmu pengetahuan disebut "*ngangsu kawruh*". Budaya pikir masyarakat Jawa lebih mengkombinasikan antara pengalaman dan kesesuaian hati dibandingkan dengan rasional dan empiris. Karena itu, aktivitas pemikiran dalam budaya Jawa diistilahkan sebagai "*menggalih*", yang berarti menggunakan hati nurani, karena berasal dari kata "*galih*" yang berarti hati. Kebenaran tertinggi yang dicapai oleh "*kawruh*" bukanlah kebenaran kritis seperti disyaratkan oleh ilmu pengetahuan melainkan satu pendekatan tentang kebijakan yang diistilahkan sebagai "*kabecikan*". Ada ungkapan kebenaran belum tentu dekat kepada kebijakan atau "*bener iku durung mesti pener*". Seseorang tidak hanya butuh mengetahui kebenaran tetapi juga harus terarah kepada kebijakan sebagai tujuan akhir (Sutrisno, 2002).

Unsur kejiwaan kebudayaan Jawa menjadikan manusia berbudi luhur dan suci dalam sikap bathin dan tingkah lakunya. Lahirnya nilai-nilai tersebut karena adanya hubungan antara manusia dengan manusia dengan Sang Hyang Illahi yang bersifat universal. Keseimbangan antara hati nurani yang berinteraksi dengan alam dan Sang Hyang Pencipta dengan dilandasi penalaran intelektual disebut '*ngelmu*'. Ketiganya

berhubungan dan tidak dapat dipisahkan dalam hidup dan kehidupan orang Jawa. (Mulder, 1996).

Persinggungan antar-budaya dan agama di seluruh dunia ikut menggoreskan lukisan di wajah budaya dan agama orang Jawa. Terjadi pengelompokan aliran, keyakinan, dan pemikiran tentang sejumlah ide dasar spiritualisme. Penelitian Geertz (1960) yang akhirnya disanggah banyak ahli, tampaknya juga mencoba memahami pemilahan pola pemikiran dan budaya spiritual masyarakat Jawa menjadi abangan, santri, dan priyayi. Kuntowijoyo (1987: 3) menyimpulkan bahwa pada akhirnya semua agama yang berkembang di tanah Jawa selalu berciri Jawanisme.

Masyarakat Jawa memiliki karakteristik budaya yang khas sesuai dengan kondisi masyarakatnya. Prabowo (2003: 24) membagi budaya menjadi dua, yaitu budaya lahir dan budaya batin. Budaya lahir terkait dengan kedudukan seseorang sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Dalam hal itu, budaya Jawa memiliki kaidah-kaidah yang dapat dengan mudah diidentifikasi berdasarkan ungkapan-ungkapan budaya sebagai pengejawantahan nilai-nilai budaya yang didukung masyarakat. Sebaliknya budaya batin terkait dengan persoalan-persoalan yang bersifat supranatural atau hal-hal yang tidak dapat dijangkau berdasarkan penghitungan empiris atau objektif tetapi menduduki posisi yang penting dalam sistem kehidupan masyarakat Jawa. Budaya batin yang dalam klasifikasi menurut Koentjaraningrat (1982: 2) dapat dimasukkan pada sistem religi atau keagamaan Jawa tersymbolisasikan dalam ungkapan *manunggaling kawula Gusti*.

Salah satu wujud ideal kebudayaan masyarakat Jawa adalah *Kejawen*. Kata *kejawen* berasal dari kata Jawi yang merupakan bentuk halus atau krama dari kata Jawa. Pengertian pertama *kejawen* mencakup segala hal yang berhubungan dengan pandangan hidup Jawa serta wawasan tentang Jawa. Menurut Mulder (1996: 7), *kejawen* bukan suatu agama tetapi cenderung kepada suatu etika dan gaya hidup yang berpedoman pada pemikiran khas Jawa. *Kejawen* sering disebut dengan istilah *Ilmu Jawi*, suatu ajaran tentang cara menjadi seorang manusia Jawa seutuhnya. Ajaran ini merupakan bentuk awal dari kebatinan yang merupakan inti dari *kejawen*, *ngelmu*, dan *laku*, yakni peraturan tingkah laku yang harus menjadi pedoman hidup manusia. Tujuannya adalah untuk membina hubungan yang selaras dan harmonis antara seseorang dengan makhluk hidup di sekitarnya. *Ngelmu* dan *laku* membina manusia untuk menjadi anggota keluarga, anggota masyarakat yang baik, menjadi manusia yang berpribadi mulia dan membimbing manusia

menuju kebahagiaan abadi yang dapat dirasakan jika roh seseorang mencapai kesatuan dengan Hyang Widhi (Hariwijaya, 1986: 228).

Pandangan dunia Jawa bertolak dari perbedaan antara dua segi fundamental seperti atas dan bawah serta hal-hal yang telah disebutkan di atas. Inilah yang menjadi titik tolak dari ajaran kejawen yang pada intinya adalah *kebatinan*, yakni gerak diri harus mengalir dari luar ke dalam, dari penguasaan lahir ke pengembangan batin. Karena itu kejawen pada hakekatnya adalah menyelaraskan diri dengan kebenaran yang lebih tinggi hingga lebur (*transenden*). Adapun hakikat dari kebatinan itu sendiri terletak pada kedudukan dan kehidupan masyarakat di dunia melalui perspektif religius. Manusia dinilai keberadaannya dalam konteks kosmologis, di tengah alam semesta yang diyakini merupakan kancah peperangan antara dua kekuatan untuk diselaraskan. Sebagaimana diungkapkan Suseno (1991: 39), bahwa keselarasan hidup dalam masyarakat Jawa ditentukan dua prinsip dasar, yaitu prinsip rukun dan hormat. Ditambahkan oleh De Jong (1985: 19-20) sifat orang Jawa adalah (1) *Narimo*, yang berarti merasa puas dengan nasibnya dan percaya bahwa Tuhan memiliki rencana sendiri untuknya, (2). *Rila*, yang berarti keikhlasan hati yang didasari pemahaman bahwa segala sesuatunya adalah milik Tuhan dan segala sesuatu yang ada di dunia adalah barang pinjaman, sewaktu-waktu akan diambil kembali, (3) *Sabar*, merupakan kelapangan dada dalam melewati segala cobaan. Kesabaran diibaratkan dengan samudera yang tidak pernah meluap meski sebanyak apapun air yang mengalirinya. KRT Widiatono menambahkan dua sikap dasar, yakni *temen*, artinya menepati janji yang telah diikrarkan dan *budi luhur*, yaitu keadaan dimana manusia selalu berusaha mengisi hidupnya dengan melakukan kebaikan terhadap sesama.

Sikap hidup yang mencerminkan kerukunan tersebut tidak terlepas dari sikap *tepo slira* (tenggang rasa). Dengan berbekal kesadaran bahwa *nandur bakal ngundhuh* (menanam akan memetik) atau *ngundhuh wohing pakarti* (memetik buah perbuatan), sikap dan perilaku orang Jawa sesungguhnya dikendalikan oleh cahaya hati nurani untuk menjauhi perbuatan nista. Bagi orang Jawa tidak berpikiran bahwa pada saat mereka memberi harus kembali kepadanya dalam bentuk kebaikan lain. Karena itu harus ikhlas dan *rila legowo* pada saat membantu, menyumbang atau meminjamkan sesuatu pada orang lain. Dalam konteks kebaikan seperti itu menurut Suratno dan Astiyanto (2009: 99) "keikhlasan" adalah ibarat "*idhep-idhep nandur pari jero*" *Pari jero* artinya padi yang memerlukan waktu lama untuk dapat *dipanen*.

Budaya Jawa mengutamakan *rasa*, *cipta*, dan *karsa* dalam hidup. Ketiganya berpadu menjadi satu kesatuan yang sangat erat. Menurut Mulder (1986) terdapat *tiga nilai utama* dalam pandangan hidup masyarakat Jawa khususnya di lingkungan keluarga *priyayi* di Surakarta. Ketiganya adalah *hormat*, *rukun*, dan *tolong-menolong*.

1) Hormat

Masyarakat Jawa memiliki ciri khusus dalam hal hormat-menghormati. Lebih bersifat kalem, sederhana, dan merendahkan diri merupakan ciri khusus pribadi orang Jawa. *Unggah-ungguh* dijadikan tolok ukur utama dalam bersosialisasi baik di lingkungan keluarga dan masyarakat. Bagaimana seorang anak harus bersikap dan bertingkah laku yang sesuai dengan seseorang yang di bawahnya, sepadan dan di atasnya. Sikap hormat mengindikasikan bahwa seseorang harus menghargai, tidak boleh menyinggung, melecehkan atau merendahkan lawan bicara.

2) Rukun

Sikap rukun merupakan salah satu ciri khas yang dijunjung oleh masyarakat Jawa. Tipe umum masyarakat Jawa ialah tidak suka adanya konflik dalam pergaulannya terutama sampai menimbulkan konflik terbuka. Konflik akan berusaha diselesaikan secara personal dan tidak membiarkan sampai diketahui orang banyak. Konflik atau perselisihan dianggap sebagai suatu *aib* yang tidak perlu diketahui oleh orang lain dan cukup diketahui oleh pelaku konflik sendiri. Dengan meredam sekuat mungkin terjadinya konflik maka diharapkan suatu kerukunan bisa tercapai. Jika suatu kerukunan hidup sudah bisa terbina dengan baik maka ketentraman sosial bisa terpelihara.

3) Tolong-menolong

Tolong-menolong merupakan salah satu ciri khas prinsip hidup masyarakat Jawa. Banyak hal dalam hidup didasari dengan sikap saling bahu-membahu atau gotong-royong. Kesadaran sebagai makhluk sosial yang harus menjunjung rasa *welas asih* dijadikan landasan utama mengapa prinsip hidup ini sangat penting. Contoh sikap tolong-menolong dalam kehidupan orang Jawa ialah *rembug desa*, *gugur gunung*, *sambatan*, *kenduren* dan sebagainya.

Sebagai *core value*, tiga prinsip hidup tersebut kemudian berkembang menjadi nilai-nilai prinsip hidup lainnya. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai dalam budaya Jawa sangatlah luas dan lentur. Namun perluasan tersebut tidak lepas dari ketiga prinsip utama. Hormat, rukun, dan tolong-menolong disebut sebagai *nilai inti*

sedangkan nilai-nilai lain yang muncul sebagai cabang dari perluasan ketiga nilai utama dijadikan sebagai pandangan hidup masyarakat Jawa disebut sebagai *nilai transformasi*.

Menurut Rukmana (1990) dalam budaya Jawa dikenal adanya istilah *pituduh* (petunjuk) dan *wewaler* (nasehat). Keduanya merupakan representasi nilai-nilai edukatif yang terkandung di dalamnya baik *nilai inti* maupun *nilai transformasi*. *Pituduh* dan *wewaler* berperan dalam menuntun dan mengatur tingkah laku manusia supaya bisa hidup damai, tenteram, sejahtera, sentosa lahir dan batin. *Pituduh* dan *wewaler* mencakup enam bidang, yakni 1) Ketuhanan Yang Maha Esa, 2) Kerohanian, 3) Kemanusiaan, 4) Kebangsaan, 5) Kekeluargaan, dan 6) Kebendaan.

4. Karakter dan Jati Diri Bangsa

a. Karakter

Istilah karakter diambil dari bahasa Yunani “*to mark*” (menandai atau mengukir) yang lebih terfokus pada tindakan atau tingkah laku. Wynne (1991) menyebutkan ada dua pengertian karakter, yakni pertama, menunjukkan bagaimana seseorang bertingkah laku. Kedua, karakter erat kaitannya dengan “*personality*”. Seseorang bisa disebut “orang yang berkarakter” kalau tingkah lakunya sesuai dengan kaidah moral.

Terbentuknya karakter karena perkembangan dasar yang telah terkena pengaruh dari ajar. Sedangkan “dasar” adalah bekal hidup atau “bakat”nya anak dari alam sebelum lahir, yang sudah menjadi satu dengan kodrat hidupnya anak (biologis). “Ajar” adalah segala sifat pendidikan dan pengajaran mulai anak dalam kandungan ibu hingga akil baligh yang dapat mewujudkan *intelligibel*, yakni tabiat yang dipengaruhi oleh masakannya angan-angan. Di dalam jiwa, karakter itu adalah imbalan yang tetap antara hidup batinnya seseorang dengan segala macam perbuatannya. Karena itu seolah-olah menjadi “lajer” atau “sendi” di dalam hidupnya yang kemudian mewujudkan sifat perangai yang khusus buat satu-satunya manusia (Dewantara, 1977: 407-408).

Dalam arti etis, watak menunjukkan sifat-sifat yang baik dan selalu dapat dipercaya. Karena itu orang yang berwatak akan menunjukkan sifat mempunyai pendirian yang teguh, baik, terpuji, dan dapat dipercaya. Berwatak berarti memiliki prinsip dalam arti moral (Barnadib, 1978: 14). Menurut Simon Philips dalam buku Refleksi Karakter Bangsa (2008: 235), karakter adalah kumpulan tata nilai yang menuju pada suatu sistem, yang melandasi pemikiran, sikap, dan perilaku yang ditampilkan. Selanjutnya, Koesoema (2007:80) menjelaskan bahwa karakter sama dengan kepribadian. Kepribadian dianggap

sebagai ciri atau karakteristik atau gaya atau sifat khas dari diri seseorang yang bersumber dari bentukan-bentukan yang diterima dari lingkungan dan juga bawaan seseorang sejak lahir, sedangkan karakter bangsa sebagai kondisi watak yang merupakan identitas bangsa.

Unsur utama dalam pembentukan karakter bangsa adalah nilai-nilai budaya. Karena itu, pengembangan pendidikan nilai budaya merupakan penentu totalitas kepribadian/ karakter bangsa yang berawal pada akar perjalanannya dan ditentukan oleh hasil proses aktualisasi nilai-nilai budaya tersebut. Pembangunan karakter suatu bangsa adalah suatu proses yang sifatnya berkelanjutan menuju pada kondisi karakter bangsa yang diinginkan. Identitas suatu bangsa adalah pilihan dan terbentuk dari pancaran karakter bangsa yang sudah melembaga/ mendarah daging atau menjadi kebiasaan sehari-hari sehingga menjadi karakter atau jati diri bangsa.

b. Pendidikan Karakter

Istilah watak karakter dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan watak, sifat dan hakiki seseorang atau kelompok bangsa. Istilah watak (*character*) mempunyai arti beragam, yakni (1) karakter berarti jati diri seseorang yang meliputi keseluruhan sikap/ tingkah laku seseorang yang dikenal dalam berbagai situasi, (2) dalam arti sempit karakter adalah sifat dari seseorang yang sangat menonjol, (3) orang berkarakter adalah orang yang memiliki integritas moral yang sangat tinggi, (4) seorang yang berkarakter berarti memiliki reputasi baik dalam kehidupannya, (5) seseorang yang berkarakter memiliki kapasitas dalam pekerjaannya, (6) karakter dalam arti milik seseorang. Ada ungkapan "*This is characteristically his decision*". Keputusannya tersebut dilakukan oleh seseorang yang mempunyai watak tertentu; (7) "itu sudah wataknya" artinya tingkah laku seseorang menggambarkan kualitas pribadi orang itu (Tilaar, 2007:23)

Dilihat dari beberapa ungkapan di atas maka istilah karakter mengandung dua muatan, yakni muatan etis dalam karakter dan merupakan milik seseorang atau pun suatu masyarakat bangsa. Watak atau karakter juga diartikan sebagai semua gejala pada seseorang (seluruh kepribadiannya) yang dapat dilihat dari pandangannya tentang hal-hal yang salah atau benar, yang baik atau buruk. Karakter bersumber dari jati diri dan dikembangkan oleh proses sosialisasi nilai-nilai budaya dan interaksi dengan orang lain yang berlangsung secara terus-menerus sejak manusia dilahirkan melalui pendidikan – pergaulan – pembelajaran - pengalaman. Dengan kata lain karakter adalah kumpulan tata nilai yang mewujud dalam suatu sistem daya dorong yang melandasi pemikiran, sikap, dan perilaku yang ditampilkan seseorang.

Menurut Samsuri (2009:1) dan Zuchdi (2008:5) pendidikan karakter, pendidikan nilai, dan pendidikan moral sering disamakan. Pendidikan karakter merupakan upaya untuk menginternalisasikan nilai-nilai utama atau nilai-nilai positif kepada warga masyarakat agar menjadi warga bangsa yang percaya diri, tahan uji, dan bermoral tinggi, demokratis dan bertanggung jawab serta survive dalam kehidupan bermasyarakat. Karakter mencerminkan kepribadian yang berkaitan dengan moralitas namun kualitas moral itu sedemikian khas sehingga berbeda kualitas dengan orang lain atau kelompok masyarakat yang lain.

Fungsi utama dari pendidikan nilai ini bersifat abstrak, yakni penanaman nilai-nilai budaya sebagai pembentuk pribadi (pada skala individu) dan sebagai pembentuk jati diri bangsa (pada skala kebangsaan). Sedangkan bagian yang konkrit adalah pengajaran, yaitu upaya-upaya untuk mengalihkan pengetahuan dari guru kepada murid. Ukuran keberhasilan dari aspek pengajaran ini lebih jelas karena itu umumnya orang menganggap bahwa hasil pengajaran inilah yang betul-betul dibutuhkan dalam dunia kerja. Dengan demikian maka pendidikan yang berfungsi mencerdaskan bangsa itu harus menghasilkan manusia-manusia yang berdaya guna dalam dunia kerja, sekaligus kreatif dan berbudaya.

Zamroni (1993: 147-8) menjelaskan bahwa dari kenyataan tersebut maka untuk membangun karakter dan bangsa diperlukan *political will* atau komitmen dari pemerintah atau penguasa. Pendidikan karakter adalah pendidikan budi pekerti plus, yaitu pendidikan yang melibatkan aspek pengetahuan (*cognitive*), perasaan (*feeling*), dan tindakan (*action*). Menurut Lickona (1992), tanpa ketiga aspek ini maka pendidikan karakter tidak akan efektif, dan pelaksanaannya pun harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Dengan pendidikan karakter, seorang anak akan menjadi cerdas emosinya. Kecerdasan emosi adalah bekal terpenting dalam mempersiapkan anak menyongsong masa depan, karena dengannya seseorang akan dapat berhasil dalam menghadapi segala macam tantangan, termasuk tantangan untuk berhasil secara akademis.

Secara akademik, pendidikan karakter dimaknai sebagai pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak yang tujuannya mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memberikan keputusan baik-buruk, memelihara apa yang baik itu, dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati. Muatan pendidikan karakter secara psikologis mencakup dimensi *moral reasoning*, *moral feeling*, dan *moral behaviour* (Lickona, 1991) atau dalam arti utuh sebagai *morality* yang mencakup *moral judgment and moral behaviour* baik yang

bersifat *prohibition-oriented morality* maupun *pro-social morality* (Piaget, 1967; Kohlberg, 1975; Berg, 1981).

Secara pedagogis, pendidikan karakter sebaiknya dikembangkan dengan menerapkan *holistic approach*, dengan pengertian bahwa “*Effective character education is not adding a program or set of programs. Rather it is a tranformation of the culture and life of the school*” (Berkowitz, 2010). Sementara itu Lickona (1992) menegaskan bahwa “*In character education, it’s clear we want our children are able to judge what is right, care deeply about what is right, and then do what they believe to be right-even in the face of pressure form without and temptation from within*”.

Dalam pengembangan pendidikan karakter di sekolah, institusi pendidikan atau sekolah harus menjadi lingkungan yang kondusif. Menurut Lewis (1996:8) pendidikan karakter akan senantiasa mengembangkan akhlak mulia dan kebiasaan yang baik bagi para peserta didik. Bulach (2002:80) menjelaskan guru dan orang tua perlu membuat kesepakatan tentang nilai-nilai utama apa yang perlu di belajarkan misalnya: *respect for self, others, and property; honesty; self-control/discipline*. Dalam kaitan ini, Lickona (2000: 48) menyebutkan beberapa nilai kebaikan yang perlu dihayati dan dibiasakan dalam kehidupan peserta didik agar tercipta kehidupan yang harmonis di dalam keluarga dan masyarakat. Beberapa nilai itu antara lain kejujuran, kasih sayang, pengendalian diri, saling menghargai atau menghormati, kerjasama, tanggung jawab, dan ketekunan. Pendidikan karakter bukan sekadar memiliki dimensi integratif, dalam arti mengukuhkan moral intelektual peserta didik atas dasar nilai-nilai kebaikan sehingga menjadi pribadi yang mantap dan tahan uji, pribadi-pribadi yang cendekia, mandiri, dan bernurani tetapi juga bersifat kuratif secara personal maupun sosial.

Koesoema (2007:116) berpendapat bahwa pendidikan karakter dapat menjadi salah satu langkah untuk menyembuhkan penyakit sosial. Dalam konteks keindonesiaan pendidikan karakter adalah proses menyaturasakan sistem nilai kemanusiaan dan nilai-nilai budaya Indonesia dalam dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pendidikan karakter bangsa merupakan suatu proses pembudayaan dan transformasi nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai budaya bangsa (Indonesia) untuk melahirkan insan atau warga negara yang berperadaban tinggi dan warga negara yang berkarakter. Karakter bangsa adalah sebuah keunikan suatu komunitas yang mengandung perekat kultural bagi setiap warga negara. Karakter bangsa menyangkut perilaku yang

mengandung *core values* dan nilai-nilai yang berakar pada filosofi Pancasila dan simbol-simbol keindonesiaan.

Secara formal, internalisasi nilai-nilai moral melalui pengembangan kemampuan ke dalam domain afektif kognitif, afektif, dan psikomotorik sudah dirumuskan dalam kebijakan pendidikan di Indonesia tetapi kurang jelas implementasinya karena lebih menekankan pada pengembangan kognitif. Dikemukakan oleh Ringness (1975: 5) bahwa: *“One finds affective behavior in any school situation –indeed, in any situation- but compared to cognitive learning, relatively little affective learning has been deliberately introduced into the curriculum”*.

Dalam rangka membangun kepribadian utuh diperlukan keseimbangan ketiga aspek tersebut. Pendidikan karakter yang esensinya adalah internalisasi nilai-nilai moral termasuk dalam pengembangan domain afektif. Domain afektif berkaitan dengan aspek batiniah (*the internal side*) yang tidak dapat diamati maka dalam pemahamannya sering ditemukan konsep yang tumpang-tindih. Domain afektif berhubungan dengan perasaan, emosi, rasa senang-tidak senang, apresiasi, sikap, nilai-nilai, moral, karakter dan lain-lain. Adanya tumpang-tindih konsep terlihat dalam pendapat Ringness (1975: 5) yang menyatakan sebagai berikut. *“The affective domain includes all behavior connected with feelings and emotions. Thus, as was earlier stated, emotions, tastes and preferences, appreciations, attitudes and values, morals and character, and aspects of personality adjustment or mental health are included”*.

Proses internalisasi nilai-nilai moral ke dalam domain afektif meliputi beberapa jenjang dan jenjang afeksi yang paling dalam adalah karakterisasi (pembentukan karakter). Krathwohl dkk (1964) mengemukakan taksonomi domain afektif yang cakupannya secara hirarkhis, meliputi: (1) *receiving*, (2) *responding*, (3) *valuing*, (4) *organization*, and (5) *characterization* (Bloom, *et.al*, 1981: 301-302; Ringness, 1975: 21). Dengan demikian karakterisasi adalah proses internalisasi nilai yang telah mencapai tingkatan paling tinggi/dalam. Penghayatan terhadap suatu nilai, pada tingkatan yang sangat dalam maka nilai itu telah mengkarakter atau menjadi penanda khas kepribadian orang yang bersangkutan.

Pendidikan karakter dalam konteks pembelajaran humanitis memerlukan kemampuan guru untuk menyentuh dan menyapa keseluruhan dan keutuhan pribadi anak didik. Keutuhan pribadi manusia meliputi perasaan, rasio, imajinasi, kreativitas dan memori. Pendidikan karakter diawali dengan pengetahuan. Pengetahuan tersebut bisa

bersumber dari pengetahuan agama, sosial, budaya. Kemudian dari pengetahuan itu diharapkan dapat membentuk sikap atau akhlak yang mulia.

Menurut Megawangi (2003) kualitas karakter meliputi sembilan pilar, yaitu: cinta Tuhan dan segenap ciptaan-Nya, tanggung jawab, disiplin dan mandiri, jujur/ amanah dan arif, hormat dan santun, dermawan, suka menolong, dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan adil, baik dan rendah hati serta toleran, cinta damai dan kesatuan. Kemudian, Sumantri (2010) menjelaskan beberapa esensi nilai karakter yang dapat dieksplorasi, diklarifikasi dan direalisasikan melalui pembelajaran baik dalam intra maupun ekstrakurikuler, antara lain sebagai berikut: 1) ideologi, meliputi: disiplin, hukum dan tata tertib, mencintai tanah air, demokrasi, mendahulukan kepentingan umum, berani, setia kawan/solidaritas, rasa kebangsaan, patriotik, warga negara produktif, martabat/harga diri, setia/bela negara, 2) agama, meliputi: iman kepada Tuhan Yang Maha Esa, taat pada perintah Tuhan cinta agama, patuh pada ajaran agama, berakhlak, berbuat kebajikan, suka menolong dan bermanfaat bagi orang lain, berdoa dan bertawakal, peduli terhadap sesama, berperikemanusiaan, adil, bermoral dan bijaksana, 3) budaya, meliputi: toleransi dan itikad baik, baik hati, empati, tata cara dan etiket, sopan santun, bahagia/gembira, sehat, dermawan, persahabatan, pengakuan, menghormati, berterima kasih.

Karakter dalam *The Six Pillars of Character* yang dikeluarkan oleh *Character Counts Coalition (a project of The Joseph Institute of Ethics)* adalah sebagai berikut.

- 1) *Trustworthiness*, bentuk karakter yang membuat seseorang menjadi berintegritas, jujur, dan loyal.
- 2) *Fairness*, bentuk karakter yang membuat seseorang memiliki pemikiran terbuka serta tidak suka memanfaatkan orang lain.
- 3) *Caring*, bentuk karakter yang membuat seseorang memiliki sikap peduli dan perhatian terhadap orang lain maupun kondisi sosial lingkungan sekitar.
- 4) *Respect*, bentuk karakter yang membuat seseorang selalu menghargai dan menghormati orang lain.
- 5) *Citizenship*, bentuk karakter yang membuat seseorang sadar hukum dan peraturan serta peduli terhadap lingkungan alam.
- 6) *Responsibility*, bentuk karakter yang membuat seseorang bertanggung jawab, disiplin, dan selalu melakukan sesuatu dengan sebaik mungkin.

Pendidikan karakter sejalan dengan pengembangan kurikulum pendidikan dasar (SD dan SMP) yang menekankan pada 4 (empat) pilar pendidikan yang ditetapkan UNESCO, yaitu belajar mengetahui (*learning to know*), menjadi dirinya sendiri (*learning to be*), belajar bekerja (*learning to do*) dan belajar hidup bersama (*learning to live together*). Pengembangan kurikulum (program belajar) di SMP harus memfasilitasi peserta didik untuk belajar lebih bebas dan mempunyai pandangan sendiri yang disertai dengan rasa tanggung jawab pribadi untuk mencapai tujuan hidup dan tujuan bersama sebagai anggota masyarakat. Hal ini yang selanjutnya menjadi hakekat dari pendidikan karakter.

Pengertian karakter bangsa dalam Desain Induk Pembangunan Karakter Bangsa (2010:7) adalah kualitas perilaku kolektif kebangsaan yang unik, baik tercermin dalam kesadaran pemahaman rasa, karsa dan perilaku berbangsa dan berbegara dan hasil olah pikir, olah hati, olah rasa dan karsa serta olah raga seseorang/sekelompok orang. Sejalan dengan pendapat tersebut, Sapriya (2008:205) menjelaskan bahwa karakter bangsa dimaknai sebagai ciri-ciri kepribadian yang relatif tetap, gaya hidup yang khas, cara berfikir, bersikap dan berperilaku yang membedakan bagsa Indonesia dengan bangsa lain. Berangkat dari falsafah Negara Pancasila (Suparno, 2005: 90-91) menyebutkan karakter bangsa Indonesia terdiri dari lima butir sesuai dengan 5 sila Pancasila, yakni sebagai berikut.

- 1) Bangsa Indonesia adalah manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, patuh pada hukum pemerintah dan Undang Undang serta peraturan yang berlaku;
- 2) Bangsa Indonesia adalah manusia yang bangga sebagai warga Negara Indonesia serta mencintai Tanah air bangsa, berbudi pekerti baik, siap membela Negara dan angsa demi tegaknya Negara RI;
- 3) Bangsa Indonesia di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah manusia yang memiliki jiwa kebersamaan, gotong royong dan toleransi;
- 4) Bangsa Indonesia adalah manusia yang berbadan sehat,bersih, hemat dan jujur, cermat, rajin tepat waktu serta disiplin tinggi;
- 5) Bangsa Indonesia adalah manusia yang memiliki jiwa dan rasa adil, kepedulian dan kemanusiaan.

Pendidikan karakter dengan penggalian nilai-nilai kearifan lokal dapat menjadi langkah bijaksana agar bangsa Indonesia tidak kehilangan karakter bangsa dengan

keanekaragamannya. Peningkatan mutu pendidikan tersebut sekaligus untuk memunculkan generasi yang berkarakter. Karena itu pembentukan karakter dalam diri individu merupakan fungsi dari seluruh potensi individu manusia (kognitif, afektif, konatif, dan psikomotorik) dalam konteks interaksi sosial (dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat) dan berlangsung sepanjang hayat.

Kemendiknas (2010: 9-10) mengidentifikasi sejumlah nilai untuk pendidikan budaya dan karakter bangsa sebagai berikut.

Tabel Nilai Budaya dan Karakter dari Kemendiknas

NILAI	DESKRIPSI
1. Religius	Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain.
2. Jujur	Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan.
3. Toleransi	Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya.
4. Disiplin	Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan.
5. Kerja Keras	Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.
6. Kreatif	Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki.
7. Mandiri	Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas.
8. Demokratis	Cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain.

9. Rasa Ingin Tahu	Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar.
10. Semangat Kebangsaan	Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya.
11. Cinta Tanah Air	Cara berfikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa.
12. Menghargai Prestasi	Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain.
13. Bersahabat/ Komunikatif	Tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain.
14. Cinta Damai	Sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya.
15. Gemar Membaca	Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya.
16. Peduli lingkungan	Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi.
17. Peduli Sosial	Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.
18. Tanggung-jawab	Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan YME.

Karakter bangsa adalah akumulasi yang terbentuk dari karakter orang per orang, merupakan kumpulan tata nilai yang dianut suatu bangsa, sebagai pemikiran, sikap dan perilaku umum dari bangsa tersebut. Unsur utama dalam pembentukan karakter bangsa adalah nilai-nilai budaya. Pengembangan budaya merupakan penentu totalitas

kepribadian/ karakter bangsa yang berawal pada akar perjalanan sejarah dan ditentukan oleh hasil proses aktualisasi nilai-nilai budaya tersebut, kemudian dijadikan dasar dan tujuan pengembangan hidup bersama sebagai bangsa. Dalam hal ini prasyarat sebagai bangsa adalah aspek kesadaran moral (*conscience morale*), solidaritas dan kesediaan memberikan pengorbanan bagi kebangkitan eksistensi dan terwujudnya cita-cita bangsanya.

Menurut Kaelan (2007:07) Istilah “identitas nasional” secara terminologis adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain. Berdasarkan pengertian ini maka setiap bangsa di dunia akan memiliki identitas sendiri-sendiri sesuai dengan keunikan, sifat, ciri-ciri serta karakter dari bangsa tersebut. Jadi identitas nasional adalah sebuah kesatuan yang terikat dengan wilayah dan selalu memiliki wilayah (tanah tumpah darah mereka sendiri) dan sangat ditentukan oleh proses bagaimana bangsa tersebut terbentuk secara historis.

c. **Jati Diri Bangsa**

Identitas nasional suatu bangsa tidak dapat dipisahkan dengan jati diri suatu bangsa atau lebih populer disebut sebagai kepribadian suatu bangsa. Istilah kepribadian sebagai suatu identitas adalah keseluruhan atau totalitas dari faktor-faktor biologis, psikologis dan sosiologis yang mendasari tingkah laku individu. Tingkah laku tersebut terdiri atas kebiasaan, sikap, sifat-sifat serta karakter yang berada pada seseorang sehingga seseorang tersebut berbeda dengan orang yang lainnya. Jati diri bangsa atau identitas suatu bangsa adalah pilihan karena merupakan tatanan kehidupan masyarakat/ bangsa yang harus dibentuk. Jati diri bangsa terbentuk dari pancaran karakter bangsa yang sudah melembaga/mendarah daging atau menjadi kebiasaan sehari-hari sehingga menjadi identitas atau ciri umum dari bangsa tersebut. Dengan demikian pembangunan karakter bangsa adalah suatu proses yang sifatnya berkelanjutan menuju pada kondisi karakter bangsa yang diinginkan.

Sebagaimana dijelaskan Kaelan (2007:18) kelahiran identitas nasional suatu bangsa memiliki sifat, ciri khas serta keunikan sendiri-sendiri, yang sangat ditentukan oleh factor-faktor yang mendukung kelahiran identitas nasional tersebut. Adapun faktor-faktor yang mendukung kelahiran identitas bangsa Indonesia meliputi (1) faktor objektif, yang meliputi faktor geografis, ekologis, dan demografis, (2) faktor subjektif, yaitu faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia.

Menurut Kibawa (2010: 1) identitas berarti ciri-ciri, sifat-sifat khas yang melekat pada suatu hal sehingga menunjukkan suatu keunikannya serta membedakannya dengan hal-hal lain. Proses konstruksi identitas dalam komunitas besar dan kompleks, yakni bangsa (*nation*), selalu melibatkan inovasi politis (*political innovation*). Dengan cara itu berbagai hal yang dipilih dan digunakan sebagai simbol identitas akan mendapat pengakuan sebagai milik bersama dan dapat didayagunakan untuk membangun solidaritas. Warga komunitas merasa menjadi bagian dari kebudayaan yang sama, atau mempunyai identitas bersama, melalui perantara simbol-simbol yang penentuan dan pemaknaannya didasarkan pada konsensus. Bagi komunitas sederhana dan relatif homogen dengan interaksi sosial yang intensif dan intim, pemilihan simbol-simbol tertentu sebagai identitas kolektif cukup mudah dilakukan. Namun dalam komunitas yang besar dan kompleks dengan cakupan wilayah luas, kondisi lingkungan fisik yang beragam, dan kondisi sosiokultural heterogen, pembentukan identitas bersama dapat berlangsung dalam proses yang seringkali penuh pertentangan.

Gellner, Ernest (1983: 1) menyebutkan inovasi politis untuk mencapai tujuan itu sebagai 'nasionalisme' yang dapat dipahami dalam dua pengertian, yaitu sebagai sentimen dan gerakan. Nasionalisme sebagai sentimen merupakan "*feeling of anger aroused by the violation of the principle, or the feeling of satisfaction aroused by its fulfillment*". Sementara sebagai gerakan, nasionalisme merupakan "*one actuated by sentiment of this kind*"

Meskipun penentuan batas-batas wilayah suatu bangsa/negara lebih banyak mengekspresikan praktik politik kekuasaan tetapi sebenarnya juga ditujukan untuk mendefinisikan bahwa orang-orang yang ada di dalamnya merupakan anggota dari komunitas dan kebudayaan yang sama. Oleh karena itu, bangsa/ negara tidak dapat dilihat sebagai unit administrasi politik semata, melainkan lebih tepat disebut sebagai sebuah *cultural community* (Eriksen, 1993: 99 dan 102). Dengan demikian identitas bangsa ditentukan oleh proses bagaimana bangsa tersebut terbentuk secara historis. Karena itu Castells (2002: 10) menyebutkan sebagai *Identity: Must be situated historically*. Identitas bangsa berhubungan dengan pengalaman sebuah bangsa di masa lalu dan tidak dapat dipisahkan dengan jati diri bangsa.

B. Penelitian Yang Relevan

Hasil penelitian Fajar Hardoyono, Tinjauan Aspek Budaya pada Pembelajaran IPA: Pentingnya Pengembangan Kurikulum IPA Berbasis Kebudayaan Lokal, menyimpulkan bahwa (1) Latar belakang budaya yang dimiliki siswa (*student's prior belief*) berpengaruh terhadap proses pembelajaran siswa dalam usahanya menguasai konsep-konsep Sains Barat yang diajarkan di sekolah. (2) Kurikulum hendaknya memperhatikan dan peduli terhadap sistem sosial budaya yang berkembang dan berlaku di suatu masyarakat. (3) pengembangan kurikulum IPA perlu mengintegrasikan muatan Sains Tradisional (*ethnoscience*) agar proses pembelajaran siswa menjadi bermakna dan kontekstual.

Hasil penelitian Alexon dan Nana Syaodih Sukmadinata tentang "Pengembangan Model Pembelajaran Terpadu Berbasis Budaya untuk meningkatkan Apresiasi Siswa terhadap Budaya Lokal (Studi pada Mata Pelajaran IPS Sekolah Dasar)". Hasil penelitian menyebutkan bahwa MPTBB terbukti secara signifikan lebih efektif meningkatkan apresiasi siswa terhadap budaya lokal simultan dengan penguasaan materi pelajaran bila dibandingkan dengan model pembelajaran yang selama ini digunakan guru.

Penelitian Nurul Zuriah, Dosen PKn-FKIP-Universitas Muhammadiyah Malang tentang Model Pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan Multikultural Berbasis Kearifan Lokal dalam Fenomena Sosial Pasca Reformasi di Perguruan Tinggi. Penelitian Nurul bertujuan mengkaji model pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan multikultural berbasis kearifan lokal dalam fenomena sosial pasca reformasi di perguruan tinggi. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan pola "*the dominant-less dominant design*" dan desain penelitian *research and development* (R & D). Penelitian dilakukan dengan tiga tahapan: (1) Studi Pendahuluan (*Exploration study*) (2) Pengembangan model (*Action Research*) dan (3) Pengujian (*experimental study*) yang menggunakan kuasi eksperimen. Pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dokumentasi, angket (test), dan FGD. Analisis data dengan cara diskriptif kualitatif dipadukan dengan diskriptif kuantitatif serta uji t dan uji F menggunakan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Pengembangan PKn multikultural menjadi kebutuhan bangsa Indonesia yang majemuk dan beranekaragam serta menjadi sebuah keniscayaan bagi wahana desimnasi pemahaman multikulturalisme melalui jargon pendidikan multikultural. (2) Substansi materi pembelajaran Identitas Nasional cocok untuk pengembangan nilai-nilai multikulturalisme dan penumbuhan identitas

budaya bangsa yang bersumber dari budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. (3) Proses atau modus pembelajaran yang berupa sintaks model pembelajaran inkuiri sosial dituangkan dalam ikhtisar model pengembangan PKn MBKL di perguruan tinggi ke dalam enam langkah dan pembelajarannya dilakukan secara berkelompok dengan tugas/resitasi. (4) Hasil uji coba menunjukkan terjadinya peningkatan produk hasil pembelajaran, berupa peningkatan kompetensi multikultural di kalangan mahasiswa dengan harga F sebesar 4.585 yang memiliki signifikansi lebih kecil dari 0,05. Secara substansial hasil ini menunjukkan bahwa PKn MBKL efektif untuk meningkatkan kompetensi multikultural mahasiswa. Di samping itu penerapan PKn MBKL juga memberikan pengaruh yang positif terhadap aktivitas, motivasi belajar dan dampak pengiring lainnya dalam sebuah model proyek belajar kewarganegaraan (*project citizen*) melalui “*Procit Bhinneka Tunggal Ika*” di perguruan tinggi.

Hasil penelitian tentang Efektivitas Model Pembelajaran Sains Berbasis Budaya Lokal Untuk Mengembangkan Kompetensi Dasar Sains dan Nilai Kearifan Lokal di SMP oleh I Wayan Suastra & Ketut Tika, FMIPA Universitas Pendidikan Ganesha. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan model pembelajaran berbasis budaya lokal yang efektif dalam meningkatkan kompetensi dasar sains dan nilai kearifan lokal. Tujuan khusus penelitian ini adalah (1) menganalisis perbedaan kompetensi dasar sains siswa antara yang belajar dengan model pembelajaran berbasis budaya dan belajar dengan model reguler, (2) menganalisis perbedaan prestasi belajar siswa antara yang belajar dengan model pembelajaran berbasis budaya dan model reguler, (3) menganalisis perbedaan kinerja ilmiah siswa antara yang belajar dengan model pembelajaran berbasis budaya dan model reguler. Populasi penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP Negeri 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 SMP Negeri di Singaraja yang berjumlah 1.020 orang. Sampel kelas diambil secara acak yang terdistribusi 6 kelas sebagai kelas eksperimen dan 6 kelas sebagai kelas kontrol. Jumlah anggota sampel seluruhnya sebanyak 380 orang. Rancangan penelitian menggunakan Pretest-posttes Control Group Design. Hasil penelitian menunjukkan 1) Terdapat perbedaan kompetensi dasar sains siswa antara yang belajar dengan model pembelajaran berbasis budaya dan model reguler ($F= 38,176$; $p<0.05$). 2) Terdapat perbedaan prestasi belajar sains siswa antara yang belajar dengan model pembelajaran berbasis budaya dan model reguler ($F= 25,575$; $p<0.05$). 3) Terdapat perbedaan kinerja ilmiah siswa antara yang belajar dengan model pembelajaran berbasis budaya dan model reguler ($F= 24,219$; $p<0.05$).

Model Pembelajaran Sejarah Berbasis Kearifan Lokal melalui Pemanfaatan Batik Lasem sebagai Sumber Belajar pada Kelas X SMA Negeri 1 Lasem oleh Mohamad Syaiful Anam, Universitas Negeri Semarang. Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 Lasem pada siswa kelas X tahun pelajaran 2011/2012. Penelitian ini menggunakan metode Research and Development (R & D) dengan tahap-tahap sebagai berikut; studi pendahuluan, desain produk, validitasi, ujicoba, revisi dan perbaikan desain produk dan deskripsi hasil penelitian. Teknik pengumpulan data dengan teknik wawancara, observasi, dan angket. Pelaksanaan pembelajaran berbasis kearifan lokal dengan memanfaatkan batik Lasem sebagai sumber belajar menggunakan berbagai metode yaitu, ceramah bervariasi, tanya jawab, diskusi, studi lapangan, penugasan, dan presentasi dengan bantuan media gambar, video, dan power point. Penggunaan metode dan media tersebut untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ditentukan. Model pembelajaran yang dikembangkan juga lebih inovatif, menyenangkan, dan bermakna sehingga nantinya siswa lebih aktif, kritis, kreatif, dan saling bekerja sama. Pembelajaran diintegrasikan ke dalam Standar Kompetensi (SK) “Menganalisis peradaban Indonesia dan dunia” dan Kompetensi Dasar (KD) “Mengidentifikasi peradaban awal masyarakat di dunia yang berpengaruh terhadap peradaban Indonesia”. Hasil pengamatan selama proses pembelajaran berlangsung menunjukkan bahwa tingkat partisipasi para siswa dalam mengikuti pembelajaran sejarah sangat tinggi. Persepsi ini disebabkan karena siswa telah mengetahui batik Lasem sebelumnya, adanya variasi pembelajaran sejarah, sumber belajar berada di lingkungan siswa sehari-hari, dan siswa langsung mengalami dan melihatnya sendiri. Ditarik kesimpulan bahwa pembelajaran berbasis kearifan lokal melalui pemanfaatan batik Lasem sebagai sumber belajar didukung oleh lokasi sekolahan yang dekat dengan pusat produksi batik Lasem, kreativitas guru, sarana dan prasarana sekolah dan masyarakat sekitar masih memproduksi dan menjaga eksistensi batik Lasem sebagai hasil warisan leluhur. Beberapa kendala yang ditemui yakni (1) pada saat perencanaan pembelajaran, (2) pada aspek-aspek pembelajaran, dan (3) pada faktor-faktor pendukung.

C. Kerangka Pikir

